

LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTING SYSTEM (SAPD) ON LOCAL GOVERNMENT ACCOUNTABILITY PERFORMANCE (AKIPD) AT THE REGIONAL SECRETARIAT OF BUTON

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH (SAPD) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (AKIPD) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON

Rudi Abdullah

Email : rudi_tomia@yahoo.co.id

Universitas Muhammadiyah Buton

Jalan Betoambari No 36 Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Influence of Local Government Accounting System (SAPD) Against the Performance Accountability of Local Government Agencies (AKIP) At the Regional Secretariat of Buton, data was collected by questionnaire method. Analysis of data using simple regression analysis. Methods of data analysis by using simple regression analysis, type of data that is both qualitative and quantitative data, data sources primary data and secondary data. A population of 107 and sampled by simple random sampling to 45 respondents. Methods of data collection that is a preliminary survey, literature study, field survey and questionnaire where all the data in the tabulation and interpretation. Results of the analysis showed It can be seen from the regression equation $Y = 0.422 + 0.973$. Where 0,765 means that the correlation between independent variables Local Government Accounting System (SAPD) of the Local Government Performance Accountability (AKIP) is positive, the coefficient of determination (R^2) = 0.585 means that 58.5% variation of the increase in Government Accounting System area (SAPD) is affected by the Performance Accountability of Local Government Agencies (AKIP) (X) and the remaining 41.5% is influenced by other variables outside the model, so it can be concluded that the influence of the Regional Government Accounting System (SAPD) of the Local Government Performance Accountability (AKIP) strong influence.

Keywords: Accounting, Accountability, Performance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner . Analisis data menggunakan Analisis Regresi Sederhana. Metode analisi data yaitu dengan menggunakan analisis regresi sederhana, Jenis data yaitu kualitatif dan data kuantitatif, sumber data yaitu data primer dan data skunder. Populasi sebanyak 107 dan disampel dengan simple random sampling menjadi 45 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey pendahuluan, studi kepustakaan, survey lapangan dan kuesioner dimana semua data di tabulasi dan interpretasi. Hasil analisis menunjukkan Hal ini dapat dilihat dari persamaan regresi $Y = 0,422 + 0,973$. Dimana 0,765 dapat diartikan bahwa korelasi hubungan antara variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) adalah positif, Nilai koefisien determinasi (R^2) = 0,585 dapat diartikan bahwa 58,5 % variasi dari peningkatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dipengaruhi oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (X) dan sisanya 41,5 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar model, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pengaruhnya kuat.

Kata Kunci : Akuntansi, Akuntabilitas, Kinerja

PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada pemerintah daerah. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing disetiap Negara juga menuntut daya saing disetiap pemerintah daerahnya. Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih melalui adanya otonomi daerah.

Adapun manfaat penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintah. Perbedaan penerapan sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas.

Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas. Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan *single entry menjadi double entry*. *Single entry* pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan *good public governance*, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena

pengaplikasian *enrty double* dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan *auditable*. Sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan pengembangan atas sistem akuntansi yang baru, yaitu : Pengembangan sistem pembukuan berganda (*Double Entry*), dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan, yaitu sisi debit dan sisi kredit.

Penggunaan basis akrual (*Accrual Basis*) dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Dengan basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Dan semakin menguatnya tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. berkenaan dengan hal tersebut, penciptaan akuntabilitas *public* harus dilaksanakan dalam akuntansi pemerintahan untuk dapat menciptakan *good governance*.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap daerah tentunya berbeda – beda. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan diatas, beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, akuntabilitas keuangan, ketaatan pada peraturan perundangan. Sebagai contoh, jika SDM yang bekerja disebuah instansi pemerintahan daerah yang memiliki kemampuan dan keahlian dibidangnya, maka akan diperkirakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dihasilkan setiap Instansi Pemerintah daerah (Pemda) pun semakin maksimal. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Buton.

S. Nurlaela, dan Rahmawati (2010) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh

keperilakuan Organisasi Terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Hasil Penelitian ini dari analisis data dan pengujian hipotesis, ditarik kesimpulan bahwa faktor organisasional yang diuji, pengaruh pelatihan dan kejelasan tujuan terhadap kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berhasil dibuktikan.

Berdasarkan LHP (Laporan Hasil Pengauditan) yang telah disampaikan Kabupaten Buton mendapat opini “Wajar Dengan Pengecualian (WDP)”. LHP (Laporan Hasil Pengauditan) tersebut, temuan Sistem Pengendalian Intern pada LHP (Laporan Hasil Pengauditan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 adalah terdapat beberapa temuan. Sedangkan total temuan LHP (Laporan Hasil Pengauditan) atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan pada Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2012 terdapat beberapa temuan, dan yang material antara lain pembayaran honor dan transport kepada peserta bukan unsur MUSPIDA pada kegiatan rapat koordinasi unsur MUSPIDA dimana merugikan keuangan daerah serta biaya akomodasi penginapan hotel dan konsumsi peserta rapat koordinasi unsur MUSPIDA memboroskan keuangan negara, dan terdapat kelebihan bayar biaya pemungutan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) tahun. Hal ini menimbulkan dampak negatif kepercayaan publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Buton. Pemerintah harus dapat menjadikan ini sebagai pembelajaran atas kinerja yang menjadi tanggungjawab mereka dalam proses akuntabilitas. Sehingga nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah kabupaten Buton dimasa akan datang.

Penerapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dinilai masih sangat kaku, dimana belum menunjukkan akuntabilitas sesuai dengan amat undang undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah, yaitu belum adanya transparansi dan akuntabilitas tentang penggunaan keuangan daerah. Berdasarkan uraian di atas dan melihat pentingnya Sistem akuntansi pemerintahan daerah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai, “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton”.

Tujuan penelitian ini di harapkan untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang di kemukakan dalam penelitian ini di gunakan analisis *regresi* Sederhana. Untuk mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Menurut Sugiyono (2007:250), analisis *regresi linear* Sederhana digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) *variabel dependen* bila satu atau *variabel independen* sebagai *factor predictor* dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Model analisis *regresi linear* sederhana yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana :

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Daerah (AKIP),

α = Konstanta (Nilai *intercept*),

β = Koefisien Regresi,

X = Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah
(SAPD),

ε = Estimasi tingkat kesalahan / *Error*

Dalam klasifikasi variabel di tentukan mana yang sebagai variabel bebas yaitu (*independent*) adalah Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X), dan mana yang sebagai variabel terikat (*dependent*) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y) sedangkan variabel lain di luar kedua variabel tersebut dilambangkan dengan (ϵ) yang merupakan variabel - variabel yang tidak di ukur.

Untuk mengukur pengaruh variabel X terhadap variabel Y digunakan kaidah pengambilan keputusan yang di kemukakan oleh Toni (2010 : 107) sebagai berikut : Jika nilai $r > 0$ artinya telah terjadi hubungan linear yang positif yang berindikasikan bahwa makin besar nilai Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X), maka semakin besar pula Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y), atau sebaliknya. Jika nilai $r < 0$ berarti tidak ada hubungan sama sekali antara variabel X dan variabel Y. Jika nilai $r = 1$ atau $r = -1$ artinya telah terjadi hubungan *linier* sempurna yaitu berupa garis lurus, sedangkan untuk nilai r yang makin mengarah ke angka 0 maka garis makin tidak lurus.

Besarnya nilai yang di gunakan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan kaidah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Sugiyono (2007 : 231) sebagai berikut :

- Nilai $r = 0,00 - 0,199$ pengaruh yang terjadi tidak kuat,
- Nilai $r = 0,20 - 0,399$ pengaruh yang terjadi kurang kuat,
- Nilai $r = 0,40 - 0,599$ pengaruh yang terjadi sedang,
- Nilai $r = 0,60 - 0,799$ pengaruh yang terjadi kuat,
- Nilai $r = 0,80 - 1,00$ pengaruh yang terjadi sangat kuat

Untuk menentukan kecenderungan rata-rata skor jawaban responden, di gunakan kriteria interpretasi rata-rata skor kuisisioner dengan skala

liker seperti yang dikemukakan oleh Toni (2010 : 132) Sebagai Berikut : Nilai rata-rata skor :

- 1,00 – 1,99 = Buruk Sekali,
- 2,00 – 2,99 = Buruk,
- 3,00 – 3,99 = Cukup Baik,
- 4,00 – 4,99 = Baik,
- sama dengan 5,00 = Baik Sekali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dilakukan dengan menggunakan metode statistik *product moment pearson* dengan kriteria jika r yang diperoleh $> 0,30$ pada, taraf kepercayaan 95%, maka instrumen (kuesioner) dinyatakan Valid. Hasil uji validitas instrumen dimana menunjukkan bahwa semua item indikator yang mengukur masing-masing variabel indikator menghasilkan angka koefisien validitas yang lebih dari 0,3 ($r > 0,3$). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid.

Uji reliabilitas instrumen pada taraf kepercayaan 95% ($\alpha = 0,05$) diperoleh hasil dimana bahwa semua item indikator yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel indikatornya memiliki angka koefisien lebih besar dari 0,60. Karena itu, instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data dapat dinyatakan reliable pada taraf kepercayaan 95% atau $\alpha = 0,05$

Responden dalam penelitian tentang pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton adalah sebanyak 45 orang. Responden tersebut memiliki karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Umur biasanya akan mempengaruhi keadaan fisik bekerja dari cara berfikir seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada umumnya pegawai yang berumur muda dan sehat fisik serta mentalnya lebih produktif kerjanya dari pada

yang umurnya lebih tua. Manusia yang umurnya muda biasanya lebih cepat menerima hal-hal baru yang dianjurkan dan mempunyai ide-ide yang cemerlang yang dapat membuat usahanya lebih maju. Berikut ini akan diuraikan klasifikasi umur responden pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Berdasarkan hasil penelitian yaitu pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sebagian besar umur responden berkisar antara 46 tahun keatas tahun yaitu sebesar 26,66 %. Umur 31 – 35 tahun sebesar 15,55 %. Umur 21 – 25, 36 – 40, dan 41 – 45 tahun sebesar 13.33 %, 26 – 30 tahun sebesar 11.11 % dan 15 – 20 sebesar 6.66 %.

Pendidikan pada umumnya memberikan sumbangan berfikir bagi responden. Pendidikan yang relatif tinggi menyebabkan pegawai lebih dinamis. Pendidikan dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu pendidikan formal, non formal dan informal. Berdasarkan hasil penelitian diatas, tingkat pendidikan responden pada umumnya Sarjana Muda dimana jumlahnya adalah sebesar 6,66 %. Sedangkan untuk SMA/STM sebanyak 37,77 % dan Sarjana sebanyak 55,55 %.

Jenis kelamin pada umumnya akan memberikan pembeda berapa jumlah pegawai laki laki dan pegawai perempuan. Dari data dapat diketahui bahwa pada umumnya responder perempuan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yaitu sebesar 66,66% dan laki laki sebesar 33,33 %

Dari hasil kuisisioner, diperoleh total skor untuk Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD), diketahui bahwa total skor Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 1097 yang terdiri dari 5 item pertanyaan dari 45 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 4,87. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang ada adalah baik.

Dari hasil kuisisioner, diperoleh total skor untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Daerah (AKIP), diketahui bahwa total skor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) di bahwa total skor untuk dimensi ini adalah sebesar 1108 yang terdiri dari 5 item pertanyaan dari 45 responden yang berarti bahwa jika dirata-ratakan setiap responden dengan skor 4.92. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) yang ada pada adalah baik.

Penelitian tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) diperoleh hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear sederhana yang diuji dengan program SPSS 19 disajikan sebagai berikut

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Linear sederhana

Variabel Bebas	Koefisien Regresi (B)	Standar Error	T _{Hitung (Stat)}	Signifikan t	R Korelasi
Y	0,973	3.090	0.136	0,000	0,765

Konstanta = 0,422
Adjusted R Square = 0,575
R Square = 0,585

Sumber : Lampiran

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dengan menggunakan SPSS 19 diperoleh, persamaan regresi linear sederhana, pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) adalah:

$$Y = 0,422 + 0,973 X$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

1. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,765 dapat diartikan bahwa korelasi hubungan antara variabel bebas Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) (X) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (Y) adalah positif.
2. Nilai koefisien determinasi (R²) = 0,585 dapat diartikan bahwa 58,5 % variasi dari peningkatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dipengaruhi oleh Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) (X) dan sisanya 41,5 % dipengaruhi

oleh variabel lain diluar model, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pengaruhnya kuat.

3. Estimase tingkat error variabel bebas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) = 3,090 menunjukkan angkat relatif kecil yang berarti mode regresi semakin akurat untuk memprediksi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD).

Analisis Deskriptif Kuantitatif

Hasil analisis inferensial menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dapat dilihat dari nilai signifikansi t pada analisis regresi sederhana yaitu $\text{sig } t = 0,00 < \alpha = 0,05$. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Buton akan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Oleh karena itu, upaya peningkatan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sangat diperlukan dalam rangka peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton.

Besarnya pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) dapat dilihat pada koefisien regresinya sebesar 0,575. Hal ini menunjukkan bahwa apabila terjadi perubahan dimensi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan perubahan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) sebesar 97,3 %.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang digunakan guna menjawab masalah dan hipotesis dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) berpengaruh positif (kuat) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton. Dapat diindikasikan, bahwa peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) sudah baik dimana pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton secara umum berorientasikan Kuat. Hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar responder sangat setuju untuk melakukan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang pada akhirnya akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton

Saran

Untuk mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) yang baik, maka perlu adanya implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang menunjang pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton sehingga, dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Buton yang telah ditetapkan sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- ANDI. , 2006, “ Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol.2, No.1, hal 1-17

- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Bastari Imam, 2004, “*Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintah Sebagai Wujud Reformasi Manajemen Keuangan Daerah*”, Jakarta.
- Halim Abdul, 2004, “**Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**”, Jakarta : Salemba Empat.
- Jusup, Al Haryono. 2001, *Dasar-Dasar Akuntansi*, Yogyakarta : BPFE
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), 1999, “*Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah*”, Jakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”, Yogyakarta : Buku Satu, Penerbit
- Nordiawan Deddi dan Hertianti Ayuningtyas, 2010, “*Akuntansi Sektor Publik*”, Jakarta : Salemba Empat. Edisi Kedua.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2006, “*Metodologi Penelitian Bisnis*”, BPFE Yogyakarta : Edisi Pertama.
- Riakhi, Ahmed dan Balkaoui, 2000, “*Teori Akuntansi*” Terjemahan Marwata, Haryanti Widiastuti, Jakarta : Salemba Empat
- Supriyono, Bambang, 2002, “*Responsivitas dan Akuntabilitas Sektor Publik*”
- Sugiyono, 2007, *Statistika Untuk Penelitian*, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung.
- Wijaya Tony, 2010, “*Cepat Menguasai SPSS 19 : untuk olah & Interpretasi*” Yogyakarta : Cahaya Atma.
- Undang – Undang :**
- Inpres Nomor : 7 Tahun 1999 *Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Undang – Undang RI Nomor: 32 Republik Indonesia Tahun 2004, *Tentang Pemerintah Daerah.*
- Undang – Undang RI Nomor: 33 Republik Indonesia Tahun 2004, *Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No.104 Tahun 2000 *Tentang Dana Perimbangan.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 105 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 106 Tahun 2000 *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 107 Tahun 2000 *Tentang Pinjaman Daerah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 108 Tahun 2000 *Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 109 Tahun 2000 *Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 110 Tahun 2000 *Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*